

Pengaruh Jumlah Penduduk, Efisiensi Keuangan dan Biaya Barang dan Jasa terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022)

Latifah Annisa Zuren^{1*}, Deviani²,

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Korespondensi: latifahannisazuren@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of population, financial efficiency and cost of goods and services on the financial condition of local governments in Indonesia in the period 2020 to 2022. This study is a quantitative study. The type of data used is secondary data obtained from BPK and BPS throughout the provinces in Indonesia. The sample selection method in this study uses a purposive sampling method with a total sample of 32 provinces. Measurement of Financial Conditions is based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 19 of 2020. The data analysis used is multiple linear regression analysis, with the help of the SPSS 30 program. The results of the study show that population, financial efficiency and cost of goods and services have a significant positive effect on the financial condition of local governments.

Keywords : *Cost of Goods and Services; Financial Condition; Financial Efficiency; Population.*

How to cite:

Zuren, L. A., & Deviani. (2026). Pengaruh Jumlah Penduduk, Efisiensi Keuangan dan Biaya Barang dan Jasa terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022). *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 4 (1), 77-91. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v4i1.116>

PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Indonesia, kebijakan ini mendorong penerapan prinsip otonomi daerah untuk memberikan wewenang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan sumber dayanya sendiri. Implementasi dari otonomi daerah ini, sering dihadapkan dengan tantangan pengelolaan keuangan yang efektif dan berkelanjutan. Sehingga banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran mereka, terutama dalam pengumpulan pendapatan daerah, alokasi pengeluaran yang efisien dan manajemen utang yang harus dipertanggungjawabkan serta tetap memenuhi pelayanan kepada masyarakat.

Dilansir dari databoks.katadata.co.id (2022), belanja pegawai pemerintah pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan diperkirakan meningkat lagi pada tahun 2023, sementara belanja modalnya menurun. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang dirilis oleh Kementerian Keuangan pada 16 Agustus 2022, belanja pegawai pemerintah pusat pada 2022 diperkirakan mencapai sekitar Rp416,61 triliun

dan akan naik menjadi Rp442,57 triliun pada 2023. Di sisi lain, belanja modal pada 2022 diperkirakan sebesar Rp232,77 triliun dan akan berkurang menjadi Rp199,11 triliun pada 2023. Pengurangan belanja modal ini sangat disayangkan karena belanja modal dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan infrastruktur, dan penyediaan sarana-prasarana publik yang memadai. Sedangkan belanja pegawai hanya berdampak pada aparatur negara.

Fenomena lain juga terjadi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana mereka mengalami masalah kesulitan dalam membayar utang jangka pendeknya. Yustinus Prastowo, Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, mengungkapkan hasil analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 2022, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas. Pada 2023 masih terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov (CNBN Indonesia, 16 Oktober 2023).

Fenomena di atas dapat menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia dalam keadaan yang kurang sehat. Kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah tercermin melalui kondisi keuangannya. Idealnya, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, yang meliputi kemampuan untuk mengelola pendapatan dan belanja daerah secara efektif, menjaga likuiditas yang memadai, dan memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu. Pemerintah daerah yang memiliki kondisi keuangan yang sehat juga dapat mendukung pembangunan infrastruktur, menyediakan layanan publik yang berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa daerah tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakatnya. Perekonomian pemerintah akan berdampak buruk apabila pemda tidak mampu dalam memenuhi kewajiban keuangannya (Honadle dan Lloyd, 1998)

Memahami kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan kunci dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi pemda. Mengevaluasi kondisi keuangan secara periodik berguna untuk memberikan peringatan dini kepada pemerintah daerah agar dapat segera mengantisipasi jika terdapat kondisi keuangan yang tidak sehat. Mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah penting karena pemerintah daerah merupakan penyedia utama layanan langsung kepada masyarakat. Sehingga untuk dapat menawarkan layanan tersebut pemerintah harus memastikan bahwa kondisi keuangan pemda dalam keadaan yang baik (Ritonga, 2014).

Wang et al. (2007) mengartikan kondisi keuangan sebagai kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka dengan tepat waktu dan secara berkelanjutan mendanai layanannya. Suatu organisasi akan menanggung kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang ketika menawarkan barang atau jasa. Suatu organisasi dianggap memiliki kondisi keuangan yang kuat jika mampu memenuhi tanggung jawab ini tanpa menghadapi tantangan keuangan yang substansial. Namun, Menurut Zafra-Gomez et al., (2009), kondisi keuangan mengacu pada kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan menyediakan layanan publik pada tingkat yang memuaskan masyarakat. Kondisi keuangan, sebagaimana didefinisikan oleh Ritonga (2014), mengacu pada kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk komitmen operasional, jangka panjang, jangka pendek, dan penyediaan layanan publik. Kapasitas untuk meramalkan keadaan yang tidak terduga dan secara efektif dan efisien menjalankan hak-hak keuangan merupakan aspek lain dari kesehatan keuangan. Peningkatan kondisi keuangan pemerintah daerah ini sejalan dengan tujuan Negara yaitu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Noor H.F., 2015).

Dalam penelitian ini variabel kondisi keuangan pemerintah daerah diukur dan di analisis dengan menggunakan indikator pengukuran yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020. Kondisi keuangan di ukur menggunakan 6 indikator yaitu kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan. Pengukuran ini dipilih karena telah disusun dan disahkan oleh pemerintah sebagai standar nasional yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah daerah di Indonesia, artinya pengukuran ini telah sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

Peneliti Wang *et al* (2007), Casal *et al* (2011), Jones & Walker (2007) dan Wardhani & Payamta (2020) membuktikan bahwa populasi penduduk berhubungan negatif dengan indeks kondisi keuangan pemda. Sedangkan menurut Carmeli (2008) pemerintah daerah yang lebih besar memiliki kesehatan fiskal yang lebih baik dibandingkan pemda yang lebih kecil. Menurut Jin dan Zhang (2011), kondisi keuangan sangat dipengaruhi secara negatif oleh manajemen yang buruk. Selain itu, Monica (2023) mengklaim bahwa biaya produk dan layanan tidak berpengaruh pada kondisi keuangan, namun Ritonga *et al.* (2019) menemukan korelasi negatif antara keduanya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat berbagai temuan yang berbeda. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti kondisi keuangan pemerintah daerah lebih lanjut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen seperti jumlah penduduk, efisiensi keuangan, dan biaya barang dan jasa, yang menurut penelitian sebelumnya telah terbukti mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori permintaan dan penawaran. Teori ini relevan untuk pengeluaran sektor publik karena cara anggaran publik dialokasikan untuk layanan serupa dengan bagaimana rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk barang-barang pribadi (Deacon, 1978).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ritonga *et al.*, (2019). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa pada tahun 2019. Kajian ini memperluas cakupan dengan menggunakan sampel seluruh pemerintah daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020-2022. Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah variasi unit analisis dan memperluas lingkup penelitian, sehingga hasilnya bisa memberikan wawasan yang lebih luas dan lebih representatif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia secara keseluruhan. Hal ini penting karena pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang juga dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat yang lebih rendah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Efisiensi Keuangan dan Biaya Barang dan Jasa terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2020-2022)”.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori permintaan dan penawaran

Landasan kegiatan ekonomi adalah penawaran dan permintaan. Teori permintaan dapat digunakan untuk pengeluaran sektor publik karena anggaran publik untuk layanan dialokasikan serupa dengan cara keluarga mendistribusikan pendapatan mereka untuk produk pribadi, menurut Deacon (1978). Teori ini juga digunakan oleh Ohls dan Wales (1972) dalam (Ritonga *et al.*, 2019) untuk menjelaskan mengapa pengeluaran per kapita bervariasi dari satu negara ke negara lain. Kerangka kerja utama untuk menjelaskan hubungan timbal balik di antara beberapa variabel yang memengaruhi kesehatan keuangan pemerintah daerah adalah teori penawaran dan permintaan.

Dalam konteks ekonomi, permintaan merupakan jumlah dan kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen pada kondisi tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah dan kualitas barang dan jasa yang di produksi untuk ditawarkan kepada konsumen pada kondisi tertentu (Noor, H. F., 2015). Dalam lingkup pemerintah daerah, barang dan jasa yang dimaksud adalah barang dan jasa atau layanan publik yang meliputi infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sarana umum lainnya serta layanan kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan perlindungan sosial yang diharapkan oleh masyarakat atau yang disediakan oleh pemerintah. Dalam konteks lingkungan pemda, permintaan terhadap layanan barang dan jasa yang disediakan oleh pemda bergantung pada jumlah penduduk, kebutuhan dan selera masyarakat dan pendapatan per kapita masyarakat (Deacon, 1978)

Kondisi pemerintah daerah yang sehat seringkali mencerminkan keadaan masyarakat yang sejahtera. Hal ini dapat dilihat melalui hukum permintaan dan penawaran, di mana harapan masyarakat dan penawaran pemerintah mencapai titik keseimbangan. Dalam konteks ini, penawaran mencakup upaya pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa, memenuhi kewajiban, melayani, dan menyampaikan hak-hak kepada masyarakat. Sementara itu, permintaan melibatkan hak masyarakat untuk menuntut, mengungkapkan kebutuhan, serta menagih hak mereka dari pemerintah.

Kondisi keuangan pemerintah daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Kondisi Keuangan Daerah dijelaskan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab keuangannya (meliputi Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, dan Solvabilitas Pelayanan), menghadapi keadaan yang tidak terduga, dan mengelola keuangan secara efisien dan efektif. Grove *et al* (1981) & Nollenberger *et al* (2003) dalam Ritonga (2014) mendefinisikan kondisi keuangan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai layanannya secara berkelanjutan. Mereka membedakan antara solvabilitas tunai, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas tingkat layanan.

Kondisi keuangan didefinisikan dalam kerangka kesulitan fiskal oleh Kloha *et al.*, (2005) dan Jones & Walker (2007). Menurut Kloha *et.al.*, (2005), kesulitan fiskal adalah situasi ketika pemerintah daerah berjuang selama beberapa tahun untuk memenuhi persyaratan masyarakat, standar operasional, dan pembayaran utang. Sebaliknya, Jones & Walker (2007) mendefinisikan kesulitan fiskal sebagai ketidakmampuan untuk terus menyediakan layanan kepada masyarakat pada tingkat yang sebelumnya tersedia. Menurut Ritonga (2014), kesehatan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh kapasitasnya untuk memenuhi komitmen keuangannya (baik jangka pendek dan jangka panjang, operasional, dan kewajiban pelayanan masyarakat), mengantisipasi keadaan yang tidak terduga, dan secara efektif dan efisien menjalankan hak keuangannya.

Berdasarkan definisi diatas, defenisi yang paling umum diterima mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu serta kemampuan untuk memastikan layanan publik tetap berjalan dengan baik.

Jumlah penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik penduduk adalah seluruh orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan namun bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk didefinisikan sebagai jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu daerah yang membutuhkan pelayanan dari

pemerintah dan memiliki hak untuk menuntut pelayanan yang memadai sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat serta memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan di daerah tersebut.

Efisiensi keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi merupakan kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik dan tepat tanpa menyia-nyiakan waktu, biaya, dan tenaga. Efisiensi keuangan pemerintah daerah mengacu pada praktik manajemen keuangan yang efisien yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti penggunaan teknologi dan penggunaan sumber daya tidak secara berlebihan. Praktik ini dilakukan untuk memberikan layanan dan barang yang maksimal kepada masyarakat (Ritonga et.al., 2019). Efisiensi keuangan daerah mencakup berbagai aspek seperti pengumpulan pendapatan, pengeluaran yang efisien, manajemen utang yang baik, serta pengelolaan aset yang optimal.

Biaya barang dan jasa

Biaya barang dan jasa merujuk pada total pengeluaran pemerintah daerah untuk memproduksi barang dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya terkait, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan biaya overhead. Menurut Bradford dkk. (1969) dan Baumol (1967), upah tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari biaya produksi barang dan jasa (Ritonga et.al., 2019). Dengan demikian, upah minimum regional dapat digunakan untuk mengukur biaya barang dan jasa.

Pengembangan Hipotesis

Jumlah Penduduk Terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah penduduk mempengaruhi pengeluaran per kapita pemerintah daerah dari sisi permintaan dan penawaran. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, permintaan terhadap layanan publik dan infrastruktur juga meningkat. Namun di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk juga berpotensi meningkatkan basis pajak dan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk, di mana peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang diperoleh. Penduduk berperan sebagai sumber daya utama yang sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu wilayah.

Carmeli (2008) berpendapat bahwa pemerintah daerah yang lebih kecil tidak mampu mencapai tingkat efisiensi ekonomi yang optimal karna keterbatasan sumber daya, dalam penelitiannya menemukan bahwa pemerintah daerah yang lebih besar menikmati kesehatan fiskal yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang lebih kecil. Selanjutnya Purba et.al., (2023) juga menemukan bahwa meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan begitu juga sebaliknya. Pengaruh jumlah penduduk sangat signifikan terhadap PAD. Ini menandakan bahwa penduduk sudah mulai banyak bekerja atau banyak penduduk produktif. Meningkatnya jumlah penduduk, terutama pada usia usia produktif, diharapkan akan meningkatkan kondisi keuangan pemerintah daerah melalui kontribusi pajak yang dipungut oleh pemerintah. Berdasarkan ulasan tersebut maka peneliti menarik hipotesis yaitu sebagai berikut:

H1: Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah

Efisiensi Keuangan Terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Efisiensi keuangan mengacu pada praktik manajemen keuangan yang efisien, seperti penggunaan teknologi dan sumber daya yang hemat. Efisiensi keuangan mempengaruhi penyediaan layanan dan barang oleh pemerintah daerah dari sisi penawaran. Dengan

menurunkan biaya per unit barang dan jasa, teknik efisiensi keuangan yang baik akan memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan lebih banyak produk dan layanan kepada masyarakat. Selain meningkatkan solvabilitas dan kualitas layanan, hal ini akan menggerakkan kurva penawaran ke kanan. Situasi keuangan pemerintah daerah akan membaik jika semua kondisi lain tetap sama (Ritonga et al., 2019). Dalam penelitian mereka, Jin dan Zhang (2011) menemukan bahwa kesehatan keuangan pemerintah daerah secara statistik dipengaruhi secara negatif oleh manajemen keuangan yang tidak memadai. Menurut penelitian oleh Ritonga et al. (2019), kondisi keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif oleh efisiensi keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan ulasan diatas maka peneliti menarik hipotesis yaitu sebagai berikut:

H2: Efisiensi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

Biaya Barang Dan Jasa Terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Tenaga kerja, bahan baku, dan biaya overhead merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh pemda untuk menyediakan barang dan jasa. Harga dari sumber daya ini mempengaruhi penyediaan barang dan layanan dari sisi penawaran. Biaya rata-rata per unit produk dan jasa menurun seiring dengan penurunan harga sumber daya. Kurva penawaran bergeser ke kanan karena pemerintah dapat menawarkan lebih banyak produk dan jasa kepada masyarakat. Peningkatan penyediaan barang dan jasa ini akan meningkatkan solvabilitas dan kualitas layanan, sehingga kondisi kesehatan keuangan juga akan membaik (Ritonga et al., 2019).

Sebaliknya harga sumber daya yang relevan tinggi akan mengakibatkan pemerintah daerah memasok lebih sedikit barang dan jasa untuk masyarakat. Ketika pemda memasok jumlah barang yang sama dengan dengan pemda yang memiliki harga sumber daya yang lebih rendah maka pemda ini berkemungkinan besar harus mengambil pinjaman dari pihak ketiga. Ini dapat mengakibatkan fleksibilitas keuangan, solvabilitas jangka panjang dan jangka pendek melemah yang pada gilirannya kondisi keuangan juga akan memburuk. Beck (1982) menemukan bahwa upah daerah yang terlalu tinggi memiliki kontribusi terhadap tekanan fiskal. Berdasarkan ulasan diatas maka peneliti menarik hipotesis yaitu sebagai berikut:

H3: Biaya barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji sampel dan populasi tertentu dengan cara mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, menganalisis data, dan memverifikasi hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022. Dimana Indonesia terdiri atas 34 Provinsi. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*. Data untuk variabel terikat dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020-2022 yang tersedia untuk umum dan telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data untuk variabel bebas diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan LKPD tahun 2020-2022.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kondisi Keuangan (Y)

Kondisi keuangan pemerintah daerah diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu serta kemampuan untuk memastikan layanan publik tetap berjalan dengan baik. Kondisi keuangan pemerintah daerah diukur sesuai dengan pengukuran dari Permendagri nomor 19 tahun 2020, yang terdiri dari 6 indikator pengukuran, yaitu:

1) **Kemandirian Keuangan**

$$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2) **Fleksibilitas Keuangan**

$$\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{DAK}}{\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja pegawai}}$$

3) **Solvabilitas Operasional**

$$\frac{\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO}}{\text{Total beban LO}}$$

4) **Solvabilitas Jangka Pendek**

$$\frac{(\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jk. Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

5) **Solvabilitas Jangka Panjang**

$$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$$

6) **Solvabilitas Layanan**

$$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Jumlah Penduduk (X1)

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk adalah semua individu yang tinggal di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih, atau individu yang tinggal kurang dari enam bulan tetapi berniat untuk menetap. Ukuran jumlah penduduk mengacu pada jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah pemerintah daerah pada periode tertentu. Penelitian ini menggunakan ukuran jumlah penduduk pemerintah daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020-2022 yang bisa di akses melalui Badan Pusat Statistik.

Efisiensi Keuangan (X2)

Efisiensi keuangan mengacu pada praktik manajemen keuangan yang efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beck, 1982 dalam (Ritonga *et.al.*, 2019) menemukan bahwa gaji pegawai negeri dan pengeluaran tunjangan yang sangat tinggi berkontribusi pada tekanan keuangan. Berdasarkan argumen tersebut maka rasio total belanja daerah terhadap belanja pegawai digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel efisiensi keuangan.

$$\text{Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Belanja Pegawai}}$$

Biaya Barang dan Jasa (X3)

Untuk menyediakan barang dan jasa, pemerintah membutuhkan sumber daya yang relevan. Sumber daya penting tersebut meliputi tenaga kerja, bahan baku langsung, modal,

dan tanah. Variabel ini dinilai menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) (Ritonga, et.al., 2019)

Teknik analisis data dimulai dengan analisis statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Selanjutnya analisis regresi berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji signifikan simultan (uji-F) dan uji parsial (uji-t). Alat *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* digunakan untuk membantu menganalisis data pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif adalah sebaga berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Jumlah Penduduk (X1)	96	701814	49935858	8422507.97	11576799.590
Efisiensi Keuangan (X2)	96	2.452	10.773	4.02823	1.444523
Biaya Barang dan Jasa (X3)	96	1704608	4641854	2682271.43	567687.907
Kondisi Keuangan (Y)	96	.067	.550	.25792	.119346
Valid N (listwise)	96				

Tabel 1 menjelaskan bahwa jumlah sampel (N) dalam penelitian ini adalah 96, jumlah penduduk terbanyak didapatkan dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 dengan angka 49.935.858 jiwa dan jumlah penduduk dengan angka terendah didapatkan dari provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 701.814 jiwa. Adapun rata-rata (*mean*) jumlah penduduk pemerintah provinsi adalah 8.422.507,97 dengan nilai std. deviasi 11.576.799,590.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai maksimum efisiensi keuangan didapatkan dari provinsi Papua Barat pada tahun 2020 dengan angka 10,773 dan nilai minimum dari provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 dengan angka 2,452 dengan nilai mean 4,02823 dan nilai std. deviasi 1,444523.

Variabel X3 Biaya Barang dan Jasa didapatkan nilai maksimum dari provinsi Jakarta tahun 2022 dengan angka 4.641.854. Sedangkan untuk nilai minimum dari provinsi DI Yogyakarta tahun 2020 dan 2021 dengan angka 1.704.608. Adapun nilai mean adalah 2.682.271,43 dan nilai std. deviasi adalah 567.687,907

Hasil uji statistic deskriptif terhadap kondisi keuangan menunjukkan nilai maksimum didapatkan dari Provinsi Papua dengan nilai 0.550 dan nilai minimum dari Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 dengan nilai 0.067. Sementara nilai mean adalah 0.25792 dengan nilai std. deviasi 0.119346

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.09926898
Most Extreme Differences	Absolute		.068
	Positive		.068
	Negative		-.037
Test Statistic			.068
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.346
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.334
		Upper Bound	.358

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Pada tabel didapatkan nilai sig. dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.200 yang mana hasil ini memiliki nilai lebih besar dari 0.05 yang dianggap terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

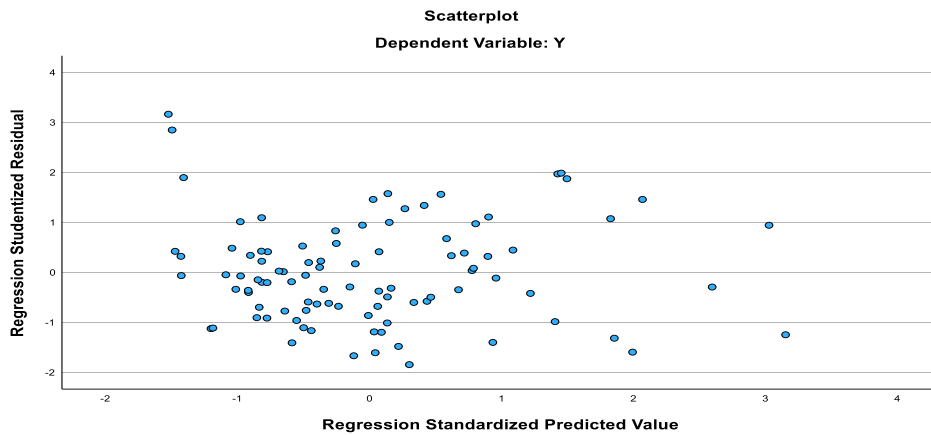
Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.080	.062		-1.282	.203		
	X1	3.105E-9	.000	.301	2.974	.004	.733	1.364
	X2	.029	.007	.357	3.939	<.001	.916	1.092
	X3	7.177E-8	.000	.341	3.402	<.001	.747	1.339

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki angka *tolerance* >0.1 dan nilai VIF <10 yang berarti data yang digunakan tidak mengalami multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan penyebaran tidak menyebar dengan baik diatas nol maupun dibawah nol di sumbu Y, maka dapat disimpulkan heteroskedastisitasnya tidak terjalain.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.555 ^a	.308	.286	.10087	2.130

a. Predictors: (Constant), Biaya Barang dan Jasa, Efisiensi Keuangan, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: Kondisi Keuangan

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan nilai Durbin Watson pada penelitian ini adalah 2,130, sementara nilai dU yang diperoleh dari tabel Durbin Watson adalah 1,7326 dan nilai 4-dU (4-1,7326) adalah 2,2674. Nilai D terletak antara dU (1,7326) dan 4-dU (2,2674). Maka dapat disimpulkan $dU < D < 4-dU$ yaitu $1,7326 < 2,130 < 2,2674$, yang berarti bahwa dalam penelitian ini tidak ada tanda-tanda autokorelasi atau tidak memiliki gejala yang berhubungan dengan autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.080	.062		-1.282	.203
	X1	3.105E-9	.000	.301	2.974	.004

X2	.029	.007	.357	3.939	<,001
X3	7.177E-8	.000	.341	3.402	<,001

a. Dependent Variable: Kondisi Keuangan

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Uji (R²)

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.555 ^a	.308	.286

Pada Tabel 5 diketahui besarnya *Adjusted R Square* adalah 0.286, hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas kepada variabel terikat sebesar 28.6%, sedangkan sisanya sebesar 71.4% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji-F)

Hasil uji simultan (Uji-F) adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.417	3	.139	13.659	<,001 ^b
	Residual	.936	92	.010		
	Total	1.353	95			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Hasil pengolahan pada Tabel 6 menunjukkan nilai sig. pada <0.001 (0.001<0.05). Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan diterima. Maka hal ini berarti variabel X1 (Jumlah Penduduk), X2 (Efisiensi Keuangan), dan X3 (Biaya Barang dan Jasa) mampu menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama atau terdapat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Parsial (Uji-t)

Hasil uji parsial (Uji-t) adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Uji t

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.080	.062		-1.282	.203
	Jumlah Penduduk	3.105E-9	.000	.301	2.974	.004
	Efisiensi Keuangan	.029	.007	.357	3.939	<.001
	Biaya Barang dan Jasa	7.177E-8	.000	.341	3.402	<.001

a. Dependent Variable: Y

Hasil pengolahan dari tabel 7 dapat disimpulkan bahwa variabel independen pertama (jumlah penduduk) memiliki nilai sig. 0.004 dengan koefisien 3.105. ini berarti bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah yang ditandai dengan nilai sig. <0.05. Selanjutnya efisiensi keuangan memiliki nilai sig. <0.001 dengan nilai koefisien 0.029, yang berarti bahwa nilai sig. <0.05 dan koefisiensi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Variabel biaya barang dan jasa memiliki nilai sig.<0.001 dan koefisien 7.177 yang berarti bahwa kondisi keuangan dipengaruhi secara positif signifikan oleh biaya barang dan jasa karena memiliki angka sig. <0.05.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik uji-t dalam penelitian ini, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah sehingga H1 diterima. Nilai signifikansi variabel jumlah penduduk adalah 0.004<0.05 dengan koefisien 3.105, yang menunjukkan bahwa kenaikan 1% jumlah penduduk akan meningkatkan kondisi keuangan sebesar 3.105 dengan asumsi variabel lain konstan. Artinya, peningkatan jumlah penduduk di suatu daerah berpotensi memperbaiki kondisi keuangan pemerintah daerah.

Penemuan ini didasarkan teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan merangsang pembangunan ekonomi, semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan akan mendorong *economic of scale* dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi. Semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin meningkat juga tingkat konsumsi dan dengan meningkatkannya tingkat konsumsi makin meningkat pula tingkat produksi yang dihasilkan yang akan meningkatkan PDRB. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk akan berakibatkan pada produktifitas yang tinggi. Peningkatan produktifitas tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja akan selalu mengiringi kenaikan jumlah penduduk.

Hasil yang didapat sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Carmeli (2008) yang menyatakan bahwa pemda dengan ukuran yang lebih besar memiliki kesehatan fiskal yang lebih baik dibandingkan pemda yang lebih kecil. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wang et.al (2007), Ritonga et.al (2019) dan Wardhani & Payamta (2020) yang mendapatkan hasil bahwa jumlah penduduk yang berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan.

Pengaruh Efisiensi Keuangan terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini didapatkan nilai signifikansi efisiensi keuangan yaitu 0.000 dengan koefisien 0.029, yang mana nilai sig. kecil dari nilai alpha yaitu 0.05, ini berarti bahwa kenaikan 1% efisiensi keuangan akan meningkatkan kondisi keuangan pemerintah daerah sebesar 0.029 dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini membuktikan bahwa efisiensi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kondisi keuangan. Sehingga H2 diterima. Maka semakin tinggi efisiensi keuangan yang dicapai pmda, akan semakin baik pula kondisi keuangannya.

Temuan ini selaras dengan teori permintaan dan penawaran yang mana efisiensi keuangan mempengaruhi penyediaan layanan dan barang oleh pemerintah daerah dari sisi penawaran. Metode efisiensi keuangan yang efektif akan menurunkan biaya per unit produk dan layanan, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk menawarkan lebih banyak barang dan layanan kepada masyarakat. Perubahan ini akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kanan dan meningkatkan solvabilitas layanan. Jika faktor-faktor lain tetap konstan, status keuangan pemerintah daerah akan menjadi lebih baik (Ritonga et al., 2019).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga et.al (2019) yang menemukan bahwa peningkatan efisiensi keuangan akan menyebabkan peningkatan indeks kondisi keuangan. Hasil serupa didapatkan oleh Monica (2023) yang menemukan efisiensi keuangan memengaruhi kesehatan keuangan pemerintah daerah karena merupakan aspek yang dapat dikelola oleh setiap pemerintahan, membantu mengoptimalkan biaya operasional dan membentuk strategi untuk meminimalkan pengeluaran pegawai yang tidak perlu.

Pengaruh Biaya Barang dan Jasa terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistic uji-t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel biaya barang dan jasa secara signifikan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah sehingga H3 ditolak. Artinya, peningkatan biaya barang dan jasa justru dapat berkontribusi pada perbaikan kondisi keuangan pemerintah daerah. Dengan nilai sig. 0.000 (lebih kecil dari alpha 0.05) dan koefisien 7.177, hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam biaya barang dan jasa akan meningkatkan kondisi keuangan pemerintah daerah sebesar 7.177 dengan asumsi variabel lain konstan.

Biaya barang dan jasa mempengaruhi penyediaan barang dan layanan dari sisi penawaran. Peningkatan biaya produksi seperti upah tenaga kerja akan mengakibatkan pemerintah daerah memasok lebih sedikit barang dan jasa kepada publik karena anggaran akan terkuras untuk membiayai kebutuhan biaya barang dan jasa. Sehingga dapat memperburuk kondisi keuangan. Namun hasil pengujian secara statistic gagal membuktikan hipotesis tersebut.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Winarni et.al., 2023 yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap PDRB perkapita. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Menurut Ritonga et.a., (2019), kondisi keuangan pemerintah daerah terdampak negatif oleh fluktuasi biaya barang dan jasa. Selain itu, penelitian Monica pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah tidak terpengaruh oleh harga produk dan jasa.

Hasil positif dalam penelitian ini mungkin disebabkan oleh besarnya pendapatan upah minimum yang didapatkan oleh masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat. Dengan tingkat upah minimum yang mengalami kenaikan akan mengakibatkan tingkat konsumsi penduduk tinggi, dan akan semakin meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat serta PDRB perkapita meningkat. Kenaikan upah minimum seharusnya diimbangi dengan produktifitas tenaga kerja yang terampil sehingga dapat meningkatkan produksi yang pada akhirnya dapat memperbaiki kondisi keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menemukan bahwa jumlah penduduk, efisiensi keuangan dan biaya barang dan jasa memiliki pengaruh yang positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: penelitian ini hanya dilakukan selama tiga tahun saja, rentang waktu yang lebih panjang mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian, variabel independen dalam penelitian ini masih rendah dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel independen yaitu 28%, dan akses informasi keuangan pada website pemerintah daerah daerah terbatas, sehingga mempersulit peneliti untuk mencari data yang dibutuhkan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya meneliti dalam periode yang lebih panjang dan menambahkan variabel lain serta menggunakan indikator yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Carmeli, A. (2008). The Fiscal Distress of Local Governments in Israel: Sources and Coping Strategies. *Administration & Society*, 39(8), 984-1007
- Casal, R. C., & Gómez, E. B. (2011). Impact of size and geographic location on the financial condition of Spanish municipalities. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 7(34), 22-39
- Honadle, B. W., & Lloyd-Jones, M. (1998). Analyzing rural local governments' financial condition: An exploratory application of three tools. *Public Budgeting & Finance*.
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). Explanators of local government distress. *Abacus*, 43(3), 396-418.
- Jin, T., & Zhang, J. (2011). Effect of local government expenditure on the ratio of output to capital: Evidence from panel data at China's provincial level. *Frontiers of Economics in China*, 6, 249-270.
- Monica, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Barat: Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1654-1668.
- Deacon, R. T. (1978). A Demand Model for the Local Public Sector. *The Review of Economics and Statistics*, 60(2), 184-192.

- Kloha, P., Weissert, C. S., & Kleine, R. (2005). Developing and testing a composite model to predict local fiscal distress. *Public Administration Review*, 65(3), 313-323
- Noor, H. F. (2015). *Ekonomi Publik: Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Indeks.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purba, E., & Manurung, E. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 1-8.
- Rachman, A. (2023). Kemenkeu Tegaskan Kondisi Sulawesi Selatan Bukan Bangkrut!. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231016132605-4-480905/kemenkeu-tegaskan-kondisi-sulawesi-selatan-bukan-bangkrut>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ritonga, I. (2019). T., Clark, C., & Wickremasinghe, G.(2019). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 1-25.
- Ritonga, I. T. (2014). DEVELOPING A MEASURE OF LOCAL GOVERNMENT'S FINANCIAL CONDITION. *Journal of Indonesian Economy & Business*, 29(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
- Wang, X., Dennis, L., & Tu, Y. S. (2007). Measuring financial condition: A study of US states. *Public Budgeting & Finance*, 27(2), 1-21.
- Wardhani, D. T., & Payamta, P. (2020). Menguji Faktor Determinan Financial Sustainability Pada Sektor Pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13-27.
- Winarni, E., Sari, Y., & Amali, M. (2023). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap PDRB Perkapita Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1182-1188.
- Zafra-Gómez, J. L., Lopez-Hernandez, A. M., & Hernández-Bastida, A. (2009). Developing a model to measure financial condition in local government: Evaluating service quality and minimizing the effects of the socioeconomic environment: An application to Spanish municipalities. *The American Review of Public Administration*, 39(4), 425-449.